

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adjie, Habib, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Irman, Tubagus, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Kelsen, Hans, *General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
- _____, *Teori Umum Hukum dan Negara, alih bahasa oleh Drs. Somardi*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.

- Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Lotulung, Paulus Efendie, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Makawimbang, Hernold Ferry, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Peerusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993
- R, Putri A., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2011.
- R, Ridwan H., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, 2003.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010.
- S, Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, MQS Publishing & AYYCCS GROUP, Bandung, 2006.
- Sahetapy, J.E, *Business "Uang Haram"*, KHN, Jakarta, 2003.
- Setiono, Bambang dan Husein, Yunus, *Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan, Pendekatan Anti Pencucian Uang*, CIFOR, Bogor, 2005.
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan kejahatan perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewemangan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cetakan ke 3, Erlangga, Jakarta, 1983.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nef'I, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

B. Sumber Lain

Budiono, Herlien, *Notaris dan kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007.

Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September - Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Husein, Yunus, 2003, *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.22, No.3.

Manan, Bagir, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

PPATK E-Learning, *Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Jakarta

Rahayuningsih, Toetik, *Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Yuridika Volume 28, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.

Yudara, N. G. *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta, Jakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1896.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

D. Internet

<http://elearning.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 29 agustus 2019 pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

PPATK E-LEARNING, *Pengaturan, Pencegahan, dan Pemberantasan Pencucian Uang*, tersedia di website <http://elearning.ppatk.go.id/mod/> diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

